PERGURUAN TINGGI AGAMA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN : SEBUAH WACANA

Moh. Abu Suhud

Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga

Abstract

Poverty is a phenomenological problem faced by people in countries. There are so many factors that lead to it, whether it is internal or external or external, that can't be detected which one is the first and main problems. They are related one another. Poverty should be regarded as a social problem since it comes out from social process and product, so that coping of the problems should also be done by the whole society and all its institutions. This paper is going to draw a theoretical framework that should be utilized by Islamic Higher Education with its *Tri Dharma Perguruan Tinggi* (The Three Services of University) to take part in eliminating poverty in countries, through moral and social approaches. These specific approaches include: religious language, scientific-academic approach, human resources development, and activities related to the needs of the society.

I. Pendahuluan.

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah yang selalu nampak pada masyarakat pedesaan di negara-negara yang sedang berkembang. Robert S. Mc Namara - sebagaimana dikutip oleh Robert Chambers --¹ menyatakan bahwa tidak kurang dari 800 juta jiwa masyarakat di negara dunia ketiga termasuk di dalamnya Indonesia, terperangkap dalam ke-

---

¹ Pernyataan Robert S. McNamara ini dikutip dari Kata Pengantar buku *World Development Report*. Lihat Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, penerjemah : Pepep Sudradjat (Jakarta : LP3ES, 1988), p. 1

miskinan absolut, yang antara lain ditandai oleh keadaan penghidupan mereka yang kurang gizi, wabah penyakit, lingkungan kumuh, tingginya angka kematian bayi, rendahnya harapan hidup.

Pembangunan dengan tujuan membebaskan masyarakat dari kemiskinan telah dilaksanakan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 sampai kini, namun tujuan tersebut relatif banyak mengalami kegagalan lebih-lebih pada Era Reformasi saat ini. Sampai saat ini belum ada gejala-gejala kuat yang mengarah pada terberantasnya masyarakat dari sindrom kemiskinan, bahkan cenderung lebih parah lagi. Bila hal yang demikian itu tidak segera dipikirkan dan dilakukan upaya-upaya penanggulangannya secara baik, maka pada saatnya nanti akan melahirkan *lost generation* dan tidak memiliki potensi yang bisa diandalkan untuk mengejar ketertinggalan dibidang pembangunan bangsa. Akibatnya masyarakat dan bangsa akan semakin mengalami kesulitan dan beban hidup yang berat.

Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama dan perlu mendapat perhatian yang serius antara mereka yang mengalaminya, masyarakat luar, berbagai lembaga yang ada di masyarakat dan pemerintah. Masyarakat miskin harus memiliki kesadaran untuk bangkit mengatasi masalahnya, pihak luar mau dan mampu berpartisipasi secara sosial dengan menggunakan berbagai macam potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk disinergikan secara baik dan proporsional dengan potensi yang ada dalam masyarakat miskin.

Perguruan Tinggi Agama sebagaimana perguruan tinggi lainnya, dalam kiprahnya tidak dapat dipisahkan dari konsep Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Yang disebut terakhir ini, acap kali dijadikan sebagai ujung tombak untuk menunjukkan eksistensi suatu Perguruan Tinggi dalam memberikan nilai manfaat terhadap lingkungannya.²

Pada era mendatang di mana problematika sosial yang muncul di tengah masyarakat kian kompleks, maka peran serta Perguruan Tinggi Agama dituntut untuk semakin aktif, dinamis dan berkualitas dalam memberikan sumbangan demi pengentasan kemiskinan di masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Apalagi jika dikaitkan dengan tanggung jawab

---

² Ali Hasyimi, "Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagai Sumber Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat", *Makalah*, (Palangkaraya : Panitia Lokakarya Nasional Pola Pembinaan dan Pengembangan PPM di Lingkungan IAIN Se- Indonesia, 24 Agustus 1994), p. 2

perguruan tinggi dalam merekonstruksikan bangunan wajah masa depan manusia Indonesia yang berkualitas, jelas menunjukkan bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun dalam mengatasi kemiskinan akan semakin menonjol. Dari paparan di atas, tulisan ini mencoba memberikan gambaran bagaimana semestinya keterlibatan Perguruan Tinggi Agama dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bangsa dalam upaya mengatasi kemiskinan yang terjadi di mana-mana terutama di pedesaan.

II. Kemiskinan di Pedesaan.

Seperti telah disebut pada bab pendahuluan bahwa kemiskinan merupakan fenomena dan masalah yang selalu tampak pada masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang. Kondisi kemiskinan ini akan mengakibatkan suatu sub budaya kemiskinan dengan ciri-ciri tertentu, yaitu kondisi masyarakat yang mengalami ketidakberdayaan, kerentanan, kelemahan fisik dan kebodohan.³

Kemiskinan memang perlu mendapat perhatian yang serius. Sebab, di manapun kita berada (baik di kota maupun di pedesaan) kita akan selalu menjumpainya. Kondisi demikian itu terjadi di antaranya dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk baik oleh faktor kelahiran maupun faktor migrasi, dan makin kecilnya peluang untuk memperoleh pekerjaan atau pendapatan yang layak. Kedua variabel itulah yang kemudian berpengaruh cukup besar pada kehidupan lingkungan.

Selain itu, kemiskinan yang melanda masyarakat bisa juga disebabkan oleh keberadaan mereka yang jauh terpencil (terisolasi) atau kurang memadainya sumber daya yang ada. Di samping itu juga adanya ketimpangan yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin, serta adanya kepincangan dalam pendapatan.⁴ Gambaran riilnya bisa dilihat pada kehidupan para petani, yang dalam stratifikasi sosial acapkali diletakkan pada golongan rendah pendapatannya, karena tingkat produksi rendah. Rendahnya produktifitas mereka karena lahan yang dimiliki semakin sempit dan kurangnya fasilitas peralatan. Akibatnya mereka tidak dapat melakukan investasi.

Faktor penyebab kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan masyarakat pedesaan di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) hal, yakni : (1) Keterbatasan akses pada faktor-faktor ekonomi, seperti lahan

---

³ Robert Chambers, *Pembangunan Desa...*, p. 3

⁴ *Ibid.*, p. 140.

pertanian, modal, kesempatan kerja, dan teknologi pertanian. (2) Faktor sosial budaya, seperti kurangnya pendidikan dan keterampilan. (3) Wilayah geografis yang tidak menguntungkan, seperti lahan pertanian yang tidak subur. (4) Kurangnya akses pada kebijakan dan fasilitas pelayanan publik, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan infrastruktur.⁵

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan selain banyak juga saling mengkait antara satu dengan yang lain dan bahkan cenderung sulit dipegang ujung pangkalnya. Sedemikian rumitnya faktor penyebab kemiskinan sehingga sering disebut dengan lingkaran kemiskinan. Berikut gambaran lingkaran kemiskinan sebagaimana digambarkan oleh dua pakar sebagai berikut:

Gambar 1 : Lingkaran setan kemiskinan⁶

⁵ Paparan lebih luas lihat Esrom Aritonang, dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta : Sekretaris Desa Bina, 2001), p. 16.

⁶ Untuk penjabaran lebih detail tentang tafsir gambar diatas baca Jalaluddin Rahmat, *Rekayasa Sosial; Reformasi atau Revolusi ?* (Bandung : Rosda karya, 1999), p. 55.

Gambar 2 : Perangkap Kemiskinan⁷

Dalam terminologi pembangunan, kaum miskin mempunyai sejumlah istilah, seperti kelompok pinggiran⁸, orang-orang yang tenggelam dalam budaya bisu⁹, petani gurem, golongan yang terlupakan, golongan terbawah, masyarakat akar rumput (*the grass root*). Istilah-istilah itu dipakai untuk menggambarkan bagaimana keadaan dan tempat tinggal mereka dalam bahtera pembangunan yang tengah bergulir. Mereka berada di bawah dan dihimpit oleh kemiskinan yang mencekik – baik material maupun sosial – sehingga menumbuhkan rasa sakit hati yang dalam, membengkokkan pikiran dan akhirnya membunuh jiwa raga yang bersangkutan.¹⁰

Kemiskinan, yang dikarenakan kondisinya serba tidak beruntung, menyebabkan dirinya menjadi pasrah pada keadaan yang ada, sehingga tidak ada upaya untuk melawan tantangan yang dihadapi. Kemiskinan atau keterbelakangan juga dialami oleh masyarakat negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia karena cara berfikir dan bertindak yang tradisional.

Memang dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan dan bekal yang dapat digunakan untuk mengatasinya, sehingga perlu upaya pihak lain untuk membantu. Robert Chambers mengatakan prakarsa untuk me-

⁷ Gambar di atas diadopsi dari Robert Chambers, *Pembangunan Desa...* p. 145.

⁸ *Ibid.*, p. 132

⁹ Paulo Freire, 1973, *Education For Critical Consciousness*, (New York : The Seabury Press, 1973), p. 5

¹⁰ Robert Chambers, *Pembangunan Desa...* p. 145

nangani kaum miskin terletak di tangan orang luar, karena orang luar inilah yang memiliki kekuatan serta sumber-sumber yang lebih besar.¹¹

III. Pemikiran ke Arah Tanggungjawab Perguruan Tinggi Tinggi Agama dalam Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan

Telah disebutkan di depan, bahwa fenomena yang selalu nampak dalam masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan harus dipandang sebagai permasalahan sosial walaupun yang menderita adalah perorangan. Karena mereka miskin, maka timbul dari proses produk sosial. Keberadaan manusia dalam kancah kehidupan ini di samping sebagai individu juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karenanya yang patut digaris bawahi adalah bahwa kemiskinan dalam masyarakat perlu dipandang dari sudut dimensi sosial ketimbang hanya sebagai kasus perorangan.

Cara pandang demikian akan membawa konsekuensi tertentu yaitu, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya semata-mata didasarkan pada kebaikan hati seseorang saja, tetapi seyogyanya lebih didasarkan pada adanya panggilan moral, kewajiban sosial dan dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan (termasuk perguruan tinggi). Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah¹². "...Tolong-menolonglah kamu (perseorangan atau lembaga) dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong-menolong atas perbuatan jahat dan dosa...".

Perguruan Tinggi Agama sebagai sebuah institusi pendidikan, memiliki potensi besar yang dapat dilibatkan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Hal ini karena di samping keberadaannya sebagai lembaga pendidikan yang berusaha untuk mencetak kader-kader penerus pembangunan, ia juga harus terlibat langsung dalam tindakan pengabdian kepada masyarakat. Pernyataan di bawah ini menunjukkan peran penting Perguruan Tinggi Agama,

"Institut Agama Islam Negeri sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, dalam kedudukannya sebagai aset pembangunan nasional, sudah barang tentu harus ikut secara aktif dalam proses pembangunan, dengan cara terjun secara langsung ke tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

---

¹¹ *Ibid.*, p. 3

¹² Q. S. A Ma'idah : 2, Lihat Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1996), p. 85.

pembangunan di bidang agama, fisik material maupun di bidang mental spiritual keagamaan".¹³

Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa, peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional dilihat dari sejauhmana kemampuan perguruan tinggi itu dalam mengejawantahkan makna Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan upaya ikut mengatasi atau mengentaskan permasalahan kemiskinan di pedesaan, hal-hal berikut perlu diperhatikan:

Pertama, Dengan keberadaannya sebagai salah satu PT agama di Indonesia, "Perguruan Tinggi Agama seharusnya melaksanakan pembangunan masyarakat (mengentaskan kemiskinan) dengan pendekatan agama, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sentuhan iman, emosionalitas yang terbimbing, dan fanatik dalam pengertian arif dan positif.¹⁴ Aspek apapun yang ditetapkan dalam rangka pengabdian Perguruan Tinggi Agama di masyarakat, keterpaduan dengan Agama perlu senantiasa terjalin sejak dari penyusunan rencana program dan konsep sampai waktu pelaksanaan dan evaluasi.¹⁵ Seorang pakar pembangunan mengatakan bahwa berbagai bidang pembangunan dalam masyarakat harus terintegrasi dengan bidang agama (mental spiritual): "*Social, economic, political, cultural, environmental and personal / spiritual development all represent essential aspect of any community's life. A programme of community development, therefore, must take all six into account.*"¹⁶

Pembangunan oleh Perguruan Tinggi Agama adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan agama Islam kepada masyarakat, dilaksanakan dengan ikhlas untuk mengabdikan dalam rangka mencapai misi PT Agama, yaitu, di samping harus mampu mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam, juga harus dapat

---

¹³ Agustiar, "Kebijakan Pengabdian Pada Masyarakat di IAIN", dalam Agussalim Sitompul, (Ed.), *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*, (Yogyakarta : BPPM P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1993), p. 4

¹⁴ Lihat paparan Mastuhu tentang "Membudayakan Pengabdian Pada Masyarakat", dalam *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 159.

¹⁵ Bandingkan dengan Ahmad Sukardja, "*Konsep Perencanaan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Pedesaan (Dilihat dari Pendekatan Agama)*", *Makalah*, (Palangkaraya : Panitia Lokakarya Nasional Pola Pembinaan dan Pengembangan PPM di Lingkungan IAIN se-Indonesia, 24 Agustus 1994), p. 4

¹⁶ Jim Ife, *Community Development (Creating Community Alternatives Vision; Analysis and Practice)*, (Sydney : Longman, 1994), p. 178.

menerapkan dan memanfaatkan ilmu agama Islam sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial yang terus berkembang. Perguruan Tinggi Agama harus menjadi sumber motivasi yang dinamis dalam proses pembangunan menuju ke arah kemajuan dan modernisasi masa depan sesuai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhai oleh Allah SWT.

Pembangunan masyarakat dalam bidang agama atau ilmu agama merupakan kegiatan yang luas sekali cakupannya. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat luasnya cakupan dan ruang lingkup agama itu sendiri. Oleh karenanya, kegiatan pembangunan masyarakat merupakan kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan agama dan penerapan nilai-nilai agama dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yaitu mewujudkan masyarakat Pancasila, berupa masyarakat sosialis religius.¹⁷ Upaya untuk mencapainya dengan mensinergikan antara masalah-masalah profan atau keduniaan dan nilai-nilai transendental. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa nilai-nilai kultural yang berasal dari manusia dan lingkungannya perlu terintegrasi dengan nilai-nilai yang berasal dari wahyu.¹⁸

Nilai-nilai agama mengajarkan bahwa orientasi hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat. Dengan demikian Perguruan Tinggi Agama tidak hanya berorientasi pada kegiatan yang bersifat keagamaan saja, akan tetapi juga merambah pada kegiatan-kegiatan fisik-lahiriah yang mengarah pada kesejahteraan kehidupan dan sosial ekonomi. Hal ini dilandasi pada ajaran agama yang menyebutkan bahwa "*kadal faqru anyakūna kufra*", yang artinya: "kemiskinan itu akan mengakibatkan kekufuran".

Kedua, terkait dengan keberadaannya sebagai lembaga ilmiah, Perguruan Tinggi Agama tidak saja harus mampu berfikir ilmiah, akan tetapi juga harus mampu melaksanakan pembangunan dengan ilmiah melalui tahapan-tahapan tertentu secara sistimatis dan berangkat dari realitas masalah yang ada secara obyektif dan sesuai dengan kebutuhan teras masyarakat (*felt needs*). Membangun masyarakat secara ilmiah sudah seharusnya menjadi ciri atau kecenderungan dari kerja insan akademis di lembaga perguruan tinggi, sehingga akan membawa hasil yang lebih

---

¹⁷ Djohan Effendi, dkk, (Ed.), *Agama dan Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Pustaka Biru, 1981), p. 45.

¹⁸ Ahmad Sukardja, "*Konsepsi Perencanaan ...*" p. 6.

maksimal. Tahapan-tahapan pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan antara lain disebutkan sebagai berikut : 1). melakukan identifikasi berbagai masalah (penyebab terjadinya kemiskinan). 2). merumuskan masalah dan sekaligus menentukan prioritasnya. 3). menyusun perencanaan yang matang. 4). melakukan sosialisasi. 5). melaksanakan program. 6). melakukan evaluasi. Dan 7). membuat laporan kegiatan.

Ketiga, Mengedepankan keterlibatan (partisipasi) masyarakat sasaran dan berbagai pihak dalam pembangunan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang terintegrasi, yaitu antara sistem *top down* yang terseleksi dengan *bottom up* dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat dan mengikutsertakan mereka pada tahap perencanaan dan implementasinya¹⁹ Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang melihat pentingnya manusia yang dibangun untuk diikutsertakan dalam segala proses pembangunan.²⁰ Jadi upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya upaya atau tindakan pemenuhan kebutuhan hidup lahiriah saja, meskipun faktor dominan yang nampak pada kemiskinan masyarakat adalah minim atau rendahnya kepemilikan materi.

Upaya membebaskan mereka dari masalah kemiskinan perlu ditekankan pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Isyarat pentingnya melihat unsur manusianya dalam pembangunan ini tertuang dalam al-Qur'an, "*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau kaum/masyarakat jika mereka tidak berusaha untuk merubah apa yang ada di dalam diri sendiri*".²¹

Mereka perlu terlibat secara aktif dan kreatif bersama dengan orang luar atau pihak lain dalam melakukan keseluruhan dari langkah-langkah pembangunan yang telah disebutkan di atas. Karena dengan keterlibatan secara penuh dalam semua langkah-langkah tadi akan membawa banyak keuntungan bagi masyarakat miskin itu sendiri, antara lain; dengan partisipasi, masyarakat yang dibangun akan sadar terhadap situasi dan masalah yang mereka hadapi. Mereka secara berangsur-angsur akan memiliki keberdayaan dengan adanya bekerja bersama. Dalam keterlibatan secara penuh akan terjadi proses belajar berpengalaman yang intensif. Mereka

---

¹⁹ Ringkasan dari paparan Kusroko Adimihardja, "Dampak Teknologi terhadap Kebudayaan di Indonesia; sistem Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Masyarakat Desa, dalam (<http://www.geocities.com/enrik/aai.htm#a>).

²⁰ Ony S. Prijono dan A.W.M. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1996), p. 133.

²¹ Q.S. Ar-Ra'du : 11, Lihat *Al Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, p. 199.

juga akan merasakan kebanggaan tersendiri, karena hasil yang didapatkan – berupa peningkatan kesejahteraan hidupnya – merupakan kerja mereka juga.

Pada saatnya dengan adanya pengalaman, kebanggaan dan prestasi akan membawa masyarakat bangkit secara mandiri dalam menghadapi tantangan hidup ke depan yang tidak akan berakhir. Bukankah pembangunan merupakan usaha yang terus menerus (*on going process*), yang meningkat terus (*an even increasing standard of living*). Artinya, usaha pembangunan berupa upaya pengentasan kemiskinan bukanlah semata-mata bersifat insidental saja, akan tetapi merupakan satu rangkaian dari rencana yang mencakup waktu tertentu guna pencapaian hasil untuk memenuhi kebutuhan saat sekarang dan dimasa yang akan datang. Jim Ife menyebut dengan istilah "*sustainability*" (berkelanjutan).

Keterlibatan berbagai pihak di luar masyarakat sasaran yang memiliki potensi berbeda-beda untuk dikontribusikan dalam upaya pembangunan, akan memungkinkan berbagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang cenderung banyak dan saling kait mengkait itu dapat diatasi secara bersama dan segera. Peran PT Agama dalam hal ini dapat berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan berbagai kekuatan (potensi) pembangunan dari berbagai pihak dengan masyarakat yang menghadapi permasalahan kemiskinan secara sinergis. Dengan demikian akan terciptalah keharmonisan antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak luar.

Keempat. Perguruan Tinggi Agama dengan fokus kajian keilmuan agama tentu akan melahirkan berbagai macam konsep pembangunan di bidang agama. Konsep itu diharapkan mampu dioperasionalkan menjadi sebuah acuan pembangunan yang jelas untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi diri dan berbagai pihak yang menginginkan melakukan pembangunan masyarakat dengan pendekatan dan bahasa agama dalam masyarakat yang mayoritas muslim ini. Sebagai contoh adalah tentang *dakwah bil hal*. Tidak sedikit ulama yang menawarkan konsep *dakwah bil hal* dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat. Tetapi bagaimana sesungguhnya *dakwah bil hal* itu pada dataran operasionalnya sehingga mampu menghantarkan masyarakat tidak saja teratasi permasalahan kemiskinannya tetapi juga mampu menyadarkan masyarakat untuk kemudian mau dan mampu hidup menggunakan nilai-nilai ajaran Islam sebagai alternatif nilai yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Contoh lain lagi adalah konsep tentang kemiskinan agama dan kefakiran. Konsep ini harus dirumuskan secara jelas tentang berbagai indikator yang

menunjukkan atau tanda bahwa dengan adanya indikator tersebut suatu masyarakat sedang mengalami kemiskinan dan kefakiran agama. Pemahaman secara jelas konsep-konsep ini penting kaitannya dengan prioritas pembangunan yang perlu dilaksanakan. Demikian juga pemahaman tentang konsep zakat produktif akan memungkinkan pendayagunaan sumber ekonomi umat lebih prospektif dan berdaya guna secara maksimal. Kemampuan memahami ajaran Islam secara tekstual dan dalam perspektif historis dan kemampuan merumuskan konsep-konsep pembangunan keagamaan berada di tangan Perguruan Tinggi Agama.

IV. Simpulan

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah yang selalu muncul pada masyarakat pedesaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya baik internal maupun eksternal dan tidak mudah untuk dikenali sebab pertama dan utamanya karena kait-mengkait antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan kemiskinan harus dilihat sebagai permasalahan sosial karena timbul dari proses dan produk sosial. Oleh karenanya penanggulangannya dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan dan melibatkan berbagai institusi yang memiliki potensi berbeda-beda.

Perguruan Tinggi Agama dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus terpanggil secara moral dan sosial untuk ikut berpartisipasi mengentaskan kemiskinan di pedesaan melalui berbagai pendekatan. Sebagai lembaga akademik yang setiap hari melakukan kajian keilmuan harus mampu melahirkan konsep-konsep yang dapat disumbangkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Sebagai bagian dari masyarakat, Perguruan Tinggi Agama harus pro aktif melakukan pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan dengan berbagai macam pendekatan, yaitu, *pertama*, pendekatan melalui bahasa agama, *kedua*, pendekatan ilmiah sebagai ciri kerja insan dan lembaga ilmiah, *ketiga*, pendekatan yang memberdayakan masyarakat dengan penekanan pada unsur manusia (pengembangan SDM) dan *keempat*, pendekatan yang mengacu pada kebutuhan teras masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiar, 1993, "Kebijaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di IAIN", dalam Agusssalim Sitompul, (Ed.), *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*, Yogyakarta : BPPM P3M IAIN Sunan Kalijaga.

- Ahmad Sukardja, 1994, "Konsepsi Perencanaan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Pedesaan (Dilihat dari Pendekatan Agama)", *Makalah*, Palangkaraya : Panitia Lokakarya Nasional Pola Pembinaan dan Pengembangan PPM di Lingkungan IAIN se- Indonesia, 24 Agustus 1994.
- Ali Hasymi, 1994, "Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagai Sumber Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat", *Makalah*, Palangkaraya : Panitia Lokakarya Nasional Pola Pembinaan dan Pengembangan PPM di Lingkungan IAIN Se- Indonesia, 24 Agustus 1994
- Chambers, Robert, 1988, *Pembangunan Desa; Mulai dari Belakang*, penerjemah : Pepep Sudradjat, Jakarta : LP3ES
- Departemen Agama R.I. 1996, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra
- Djohan Effendi, dkk, (Ed.), 1981, *Agama dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Biru,
- Esrom Aritonang, dkk., 2001, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta: Sekretaris Desa Bina
- Freire, Paulo, 1973, *Education For Critical Concioussness*, New York : The Seabury Press
- Jalaluddin Rahmat, 1999, *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi ?*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Jim Ife, 1994, *Community Development (Creating Community Alternatives Vision; Analisis and Practice)*, Sydney : Longman
- Kusroko Adimihardja, "Dampak Teknologi terhadap Kebudayaan di Indonesia;Sistem Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Masyarakat Desa", dalam http://www.geocities.com/enrik/aa1.htm/a_ T.th.
- Mastuhu, 1999, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Ony S. Prijono dan A.W.M. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : CSIS